

Analisis Sikap Uni Eropa Menolak Deklarasi Kemerdekaan Catalonia dari Spanyol

Stevanus Wijaya Tiono¹⁾, Putu Titah Kawitri Resen²⁾, A.A.A Intan Parameswari³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: stevanuswijayationo@gmail.com¹⁾, kawitriresen@unud.ac.id²⁾, prameswari.intan@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

The European Union as a regional organization in Europe, has a major role in all policies and decisions taken. The European Union in declaring a political stance certainly has deep considerations to maintain political stability and security in the region. The European Union also expressed its position regarding Catalonia's 2017 declaration of independence from Spain. This research uses qualitative research methods and Regional Security Complex Theory as analytical tool. This research shows the factors behind the policy of the European Union to reject the declaration of independence of Catalonia, starting from the location of Catalonia which is considered strategic, Catalonia's interactions are not going well with the European Union and its members, the paradox of separatism, international political stance, and current issues such as Brexit, separatism in Europe and the refugee crisis.

Keywords: Catalonia, Declaration of Independence, European Union, Spain

1. PENDAHULUAN

Separatisme adalah isu yang menakutkan bagi semua negara, kedaulatan negara pun terancam karena tindakan separatisme tersebut. Negara-negara di Eropa juga tidak luput dari tindakan separatisme, yaitu upaya suatu wilayah untuk memisahkan diri dari negara induknya. Salah satu contohnya yaitu tindakan separatisme di Spanyol. Wilayah yang hendak melepaskan diri dari Kerajaan Spanyol yaitu Catalonia, sebuah wilayah yang memiliki otonomi khusus di Spanyol. Ibukota Catalonia yaitu Barcelona, kota terbesar kedua di Spanyol setelah Madrid, Ibukota Negara Spanyol.

Pemerintah Catalonia atas persetujuan Parlemen Catalonia melaksanakan referendum pada 1 Oktober 2017, untuk mengetahui keinginan masyarakat Catalonia, ingin merdeka atau tetap bergabung dengan Kerajaan Spanyol.

Hasil dari referendum tersebut yaitu sebanyak 2,02 juta orang atau 90 persen dari orang yang ikut voting menyatakan ingin merdeka dan melepaskan diri dari Kerajaan Spanyol (CNN, 28/10/2017). Masyarakat Catalonia melihat bahwa Catalonia dihuni oleh Bangsa Catalan yang memiliki budaya dan bahasa yang berbeda dengan Kerajaan Spanyol, selain itu mereka juga beranggapan selama ini Pemerintah Spanyol hanya mengeksploitasi kekayaan Catalonia, sehingga mereka ingin merdeka dari Kerajaan Spanyol. Berdasarkan data perekonomian Spanyol, Catalonia menyumbang 20 persen perekonomian nasional Spanyol (Kompas, 02/10/2017). Berdasarkan hasil referendum tersebut, pada tanggal 27 Oktober 2017 Parlemen Catalonia mendeklarasikan kemerdekaan Catalonia dari Spanyol dan

menunjuk Carles Puigdemont sebagai Presiden Republik Catalonia (Tirto, 27/10/2017).

Tindakan referendum dan deklarasi sepihak oleh Pemerintah dan Parlemen Catalonia meningkatkan tensi politik di Spanyol. Hubungan Catalonia dengan Pemerintah Spanyol semakin memanas. Aksi separatisme dan deklarasi sepihak oleh Catalonia juga mendapatkan atensi dari dunia internasional. Dunia internasional juga memberikan sikap politik luar negerinya sebagai reaksi atas tindakan separatisme di Catalonia. Salah satu aktor internasional yang memberikan respon ialah Uni Eropa. Uni Eropa ialah organisasi kawasan yang menaungi sebagian besar negara-negara di Benua Eropa, terkhusus Eropa bagian barat. Uni Eropa juga dianggap sebagai organisasi kawasan paling mapan dan memiliki *power* yang kuat untuk memainkan peran dalam perpolitikan global. Sehingga sikap politiknya terhadap suatu isu juga turut diperhitungkan dalam politik dunia.

Uni Eropa dengan tegas dan lugas menyatakan sikapnya yaitu menolak deklarasi kemerdekaan Catalonia dari Kerajaan Spanyol. Walaupun, tidak ada pengambilan keputusan secara resmi melalui forum Uni Eropa, namun sikap politik yang dikeluarkan Uni Eropa tentu merupakan cerminan dari sebagian besar sikap politik negara anggotanya melihat isu Catalonia. Sikap negara-negara anggota Uni Eropa tersebut diwakilkan oleh pernyataan-pernyataan petinggi Uni Eropa. Salah satunya, pernyataan dari Donald Tusk yaitu Presiden Dewan Uni Eropa, Ia menegaskan Uni Eropa tidak akan mengakui kemerdekaan Catalonia dan tidak

ingin terlibat dalam konflik tersebut, karena Tusk meyakini persoalan Catalonia merupakan masalah internal Pemerintah Spanyol. Tusk juga menyarankan agar Pemerintah Spanyol segera mengambil langkah-langkah yang terukur untuk meredam kasus separatisme di Catalonia agar tidak semakin berkembang dan meluas (CNN, 27/10/2017). Pernyataan Tusk tersebut juga didukung oleh Presiden Komisi Eropa yaitu Jean Claude Juncker, Ia menyebutkan bahwa Uni Eropa akan berusaha untuk menghindari pemisahan diri dan perpecahan karena Uni Eropa menjunjung tinggi persatuan nasional dan persatuan Eropa (VOA, 01/11/2017).

Sikap Uni Eropa yang menolak deklarasi kemerdekaan Catalonia berbanding terbalik dengan sikap Uni Eropa melihat isu separatisme di Kosovo. Kosovo yang hendak memisahkan diri dari Serbia, mendapatkan dukungan secara nyata dari Uni Eropa dan sekutunya. Bahkan Uni Eropa mendirikan *European Union Rule of Law Mission* (EULEX) yang memiliki tujuan untuk mengawasi keamanan dan kestabilan politik di Kosovo. Sikap Uni Eropa yang mendukung Kosovo untuk merdeka dari Serbia hanya berselang satu dekade dengan deklarasi kemerdekaan Catalonia yang secara tegas ditolak oleh Uni Eropa. Peneliti melihat bahwa perbedaan sikap Uni Eropa tersebut dalam melihat isu separatisme sangat menarik untuk dikaji dan diteliti. Peneliti meyakini adanya variabel kompleks yang membentuk sikap politik Uni Eropa tersebut.

Penelitian ini akan berfokus untuk mengetahui alasan di balik sikap Uni Eropa yang menolak deklarasi kemerdekaan Catalonia dari

Spanyol. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang menjadi pokok pertanyaan ialah “Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi sikap Uni Eropa menolak deklarasi kemerdekaan Catalonia dari Spanyol?”. Selain itu, agar penelitian ini dapat berfokus pada satu titik permasalahan maka diperlukan batasan penelitian, yaitu peneliti akan berfokus pada sudut pandang Uni Eropa sebagai organisasi kawasan yang mewakili suara-suara anggotanya dan penelitian ini berfokus mengkaji isu Catalonia pada periode waktu tahun 2017-2018.

2. KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tulisan ilmiah yang menjadi kajian pustaka. Peneliti menjadikan penelitian sebelumnya sebagai acuan dan perspektif berbeda dalam mengkaji isu Catalonia. Terdapat tiga tulisan ilmiah yang digunakan, yaitu pertama, jurnal yang ditulis oleh Christopher K. Connolly yang berjudul “*Independence in Europe: Secession, Sovereignty, and The European Union*”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa adanya paradoks ketika Uni Eropa melihat suatu isu separatisme. Tiga komponen yang menjadi paradoks tersebut ialah *sovereignty*, *self-determination* dan *territorial integrity*. Connolly berpandangan Uni Eropa harus berhati-hati menghadapi isu separatisme di Eropa. Uni Eropa harus bisa memberikan batasan yang tepat terhadap klaim *self-determination* oleh wilayah yang hendak melepaskan diri. Disamping itu, penegakkan akan *sovereignty* dan *territorial integrity* oleh negara induk juga harus humanis

dan tidak mengancam hak asasi manusia dan demokrasi (Connolly, 2013).

Kedua, tulisan yang menjadi kajian pustaka oleh peneliti ialah skripsi yang ditulis oleh Rila Sebayang dari Universitas Pasundan dengan judul “Peran Uni Eropa Terhadap Pembangunan Stabilitas Keamanan di Kosovo Pasca Merdeka Sebagai Misi Memperluas Keanggotaan Uni Eropa di Kawasan Eropa Timur”. Ia menjelaskan bahwa Uni Eropa mengakui kemerdekaan Kosovo bukan hanya digerakkan oleh keinginan untuk membantu Masyarakat Albania di Kosovo namun lebih dari itu Uni Eropa hendak memperluas keanggotaannya di Kawasan Eropa Timur serta memperkuat pengaruhnya di kawasan tersebut. Tino juga menyampaikan bahwa dalam misi besar Uni Eropa, mereka ingin melakukan *bargaining power* di kawasan Balkan untuk menandingi pengaruh lawannya, sehingga akan terciptanya *balance of power* (Sebayang, 2016).

Ketiga, tulisan ilmiah yang menjadi kajian pustaka dalam penelitian ini yaitu jurnal mahasiswa yang ditulis oleh Pebrianta Ramadhana dari Universitas Riau dengan judul “Respon Uni Eropa Terhadap Pemisahan Diri Catalunya dari Spanyol Tahun 2017”. Dalam penelitiannya, Ia menilai bahwa Spanyol merupakan negara yang besar dan memiliki pengaruh kuat di Uni Eropa. Kontribusi yang telah diberikan Spanyol pun juga tidak sedikit. Sejarah yang panjang antara Uni Eropa dan anggotanya dengan Spanyol telah membentuk suatu aliansi yang kuat untuk menghadapi suatu permasalahan sebagai ancaman bersama. Oleh sebab itu, Uni Eropa lebih memihak dan

mendukung Kerajaan Spanyol dan menolak deklarasi kemerdekaan Catalonia (Ramadhana, 2019).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih berfokus terhadap alasan dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi penolakan Uni Eropa terhadap deklarasi kemerdekaan Catalonia dengan kajian yang lebih komprehensif dengan menggunakan *Regional Security Complex Theory* sebagai pisau analisisnya. Sehingga hasil dari penelitian ini akan menunjukkan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi sikap Uni Eropa menolak deklarasi kemerdekaan Catalonia dari Spanyol berdasarkan sudut pandang bagaimana suatu isu di kawasan dapat berpengaruh terhadap keamanan nasional negara anggota Uni Eropa yang kemudian dihipunkan dalam suatu sikap politik Uni Eropa.

Kerangka teoritis yang digunakan untuk mengkaji sikap Uni Eropa dalam isu Catalonia ini ialah konsep keamanan regional dan teori *regional security complex*. Konsep dan teori tersebut menjadi pondasi dasar bagi peneliti untuk mendukung gagasan peneliti terhadap isu yang diangkat. Pertama, konsep keamanan regional yang dicetuskan oleh Barry Buzan. Buzan (1991) menjelaskan pengertian regional dalam konteks keamanan yaitu sekumpulan negara yang berada dan terkunci dalam suatu wilayah tertentu. Buzan melihat keamanan sebagai suatu fenomena relasional, maksudnya ialah adanya hubungan dan keterkaitan antara negara satu dengan yang lain dalam suatu kawasan. Konsep yang diutarakan Buzan tersebut menjelaskan keamanan regional pada

level subsistem regional. Namun, analisis tetap ditujukan pada tingkat negara dan sistemik.

Kedua, teori *regional security complex*. Teori tersebut merupakan perwujudan dan perpanjangan dari pemikiran neorealisme. Neorealisme merupakan pemikiran yang berpandangan bahwa setiap tindakan atau sikap luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara terhadap suatu isu, disebabkan oleh adanya pengaruh dari politik dan sistem internasional yang terjadi pada saat itu. Teori yang dicetuskan Buzan (1991) ini berpandangan bahwa isu keamanan nasional tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas dan dinamika keamanan kawasan. Suatu isu keamanan di kawasan berpotensi mengancam keamanan nasional dari negara-negara di kawasan tersebut, sehingga, mereka melihat suatu ancaman di kawasan menjadi ancaman bagi negara mereka pula. Barry Buzan dan Ole Waever (2003) menjabarkan teori *regional security complex* menjadi dua variabel utama yaitu: variabel internal, meliputi: letak geografis, interaksi antar negara, dan kesamaan sistem, sedangkan variabel eksternal meliputi: situasi internasional dan isu-isu yang sedang berkembang.

3. METODELOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses dimana peneliti mencoba untuk memahami permasalahan sosial dalam masyarakat, lalu menarik suatu kesimpulan dan interpretasi terhadap isu tersebut (Cresswell, 2016). Sedangkan, metode penelitian deskriptif

adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan dan melakukan analisa namun tidak membuat kesimpulan yang luas (Sugiyono, 2005). Peneliti menggunakan beberapa sumber untuk mendukung penelitian ini, baik sumber cetak maupun elektronik. Sumber data utama dari penelitian ini yaitu literatur internasional dan nasional. Literatur tersebut berupa jurnal, buku, serta karya ilmiah yang ditulis oleh peneliti yang berkompeten. Disamping itu, peneliti juga menggunakan data dari media nasional dan internasional yang kredibel sebagai sumber pendukung.

Penelitian ini memiliki beberapa objek yang menjadi unit analisis, yaitu sebagai berikut: organisasi regional (Uni Eropa), wilayah separatis (Catalonia), dan hubungan antar unit. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik studi literatur yaitu penelitian yang berbasis dokumen/arsip dan dikaji secara komprehensif yang didapatkan dari sumber-sumber kredibel di internet. Metode *cluster* adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Metode *cluster* merupakan pengelompokan data dari berbagai sumber sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk mempermudah proses analisis dan penelitian. Selanjutnya data-data tersebut akan disajikan secara sistematis dan komprehensif agar dapat dimengerti oleh pembaca dengan baik. Data-data yang didapatkan oleh peneliti tersebut akan disajikan secara tertulis dalam penelitian ini, serta peneliti juga mencantumkan sumber pustaka untuk

memastikan bahwa data yang didapatkan ialah data yang kredibel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Catalonia dan Deklarasi Kemerdekaan Catalonia dari Spanyol

Catalonia atau yang dalam bahasa Catalan disebut Catalunya ialah salah satu wilayah di Spanyol dengan otonomi khusus. Catalonia terletak di bagian timur laut Negara Spanyol. Ibukota Catalonia yaitu Barcelona yang merupakan kota kedua terbesar di Spanyol setelah Madrid. Catalonia berbatasan langsung dengan Prancis dan Andorra di sebelah utara dan memiliki akses ke laut Mediterania di sebelah timur. Luas wilayah Catalonia yaitu 32.108 km² serta dihuni oleh 7,5 juta orang pada tahun 2017 (Statistical Institute of Catalonia, 2017). Bahasa Catalan ialah bahasa dari Bangsa Catalan dan dituturkan oleh 9 juta orang di Catalonia, Kepulauan Balearic, Andorra, dan Valencia (Keating, 1996). Catalonia terdiri dari 4 provinsi yaitu Lleida, Tarragona, Girona, dan Barcelona. Catalonia merupakan salah satu wilayah yang paling berpengaruh dalam budaya dan berkontribusi besar dalam perekonomian Spanyol.

Asal usul Catalonia dapat dilihat dari abad pertengahan, dimana saat itu Catalonia muncul sebagai daerah yang memiliki dan mengembangkan budaya dan bahasanya sendiri (Keating, 1996). Budaya dan bahasa yang berkembang dan dimiliki oleh Bangsa Catalan memiliki ciri khas yang membedakannya dengan

budaya dan bahasa Spanyol. Memasuki abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-17, Aragon dan Spanyol menguasai dan menduduki Catalonia. Perlahan namun pasti, Kerajaan Spanyol mengurangi otonomi Catalonia sejak abad ke-17 dalam misi besar Spanyol untuk menciptakan negara tunggal yang terpusat. Spanyol mengeluarkan Dekrit Nueva Planta pada tahun 1716 yang menekan Generalitat (pemerintahan otonom Catalonia) serta kewenangan hukum dan pajak dari Catalonia. Dekrit tersebut pula menetapkan bahasa Spanyol sebagai bahasa administrasi pemerintahan dan lembaga peradilan di Catalonia (Keating, 1996).

Catalonia berkembang sangat pesat dalam masa industri di Spanyol dan menjadi salah satu pusat perdagangan di Spanyol yang memasok barang untuk pasar Eropa. Pembangunan kota menjadi semakin masif, namun berbanding lurus pula dengan semakin besarnya penghasilan pajak yang harus disalurkan ke Madrid. Semangat nasionalisme pertama di Catalonia dipelopori oleh Valenti Almirall (1841-1904). Semangat tersebut muncul karena krisis ekonomi yang melanda Spanyol yang diakibatkan oleh hilangnya banyak koloni Spanyol di berbagai belahan dunia. Pada masa tersebut, sekelompok orang borjuis Catalan mendirikan Union Regionalista dan bertransformasi menjadi partai politik dengan nama Liga Regionalista pada tahun 1901, bersama dengan kaum intelektual mendominasi perpolitikan di Catalonia hingga Republik Spanyol ke-2 (Lopez, 1982).

Sejarah Catalonia kemudian berlanjut dibawah kediktatoran Perdana Menteri Spanyol Primo de Rivera. Rivera sangat membatasi otonomi yang dimiliki oleh Catalonia bahkan menutup Mancomunitat, sebuah lembaga otonom di Catalonia. Selanjutnya, setelah Rivera tidak lagi menduduki jabatan perdana menteri, Catalonia diproklamasikan merdeka pada 14 April 1931 oleh Frances Macia. Generalitat pun juga dipulihkan dan undang-undang otonomi Catalonia disahkan pada September 1932 (Gibbons, 1999). Parlemen Catalonia juga resmi berdiri pada 6 Desember 1932, Lluís Companys ditunjuk sebagai presiden parlemen pertama Catalonia.

Catalonia kehilangan otonomi yang mereka dapatkan selama era Republik Spanyol ke-2 ketika Jenderal Francisco Franco resmi menjadi perdana menteri Spanyol pada tahun 1939. Franco membubarkan institusi otonom Generalitat dan para pejabatnya pun dieksekusi serta sebagian lainnya diasingkan. Otonomi Catalonia dibekukan, bahasa Catalan dilarang dan digantikan dengan bahasa Spanyol. Masyarakat Catalonia dan kebudayaannya sangat ditekan oleh pemerintah pusat pada masa itu. Setelah Jenderal Franco wafat pada tahun 1975, pemerintahan pun dipulihkan dan berpindah ke Juan Carlos, yaitu raja dan kepala negara Spanyol. Otonomi Catalonia dipulihkan, lembaga-lembaga demokratis dibentuk, dan para tokoh politik Catalonia dipulangkan. Tarradellas menjadi Presiden Pemerintahan Catalonia, sedangkan Jordi Pujol menjadi Presiden Parlemen Catalonia.

Pada 1 Oktober 2017, Pemerintah dan Parlemen Catalonia mengadakan referendum untuk menentukan nasib Catalonia di masa yang akan datang, yaitu tetap menjadi bagian dari Negara Spanyol atau melepaskan diri dari Spanyol. Walaupun referendum tersebut diboikot oleh Pemerintah Spanyol, namun pada akhirnya 43% calon pemilih yaitu 2.286.217 orang berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hasilnya yaitu sebanyak 2.044.038 suara (92,01%) menyatakan ingin merdeka dari Spanyol, sedangkan 177.547 suara (7,99%) menyatakan tetap ingin bergabung dengan Spanyol. Sehingga pada akhirnya pada 27 Oktober 2017 (Kompas, 02/10/2017), Parlemen Catalonia mendeklarasikan kemerdekaan Catalonia serta mengangkat Carles Puigdemont sebagai Presiden Republik Catalonia (Tirto, 27/10/2017).

4.1.2 Sikap Penolakan Uni Eropa Terhadap Deklarasi Kemerdekaan Catalonia dari Spanyol

Uni Eropa memiliki pendirian yang kuat yaitu menolak separatisme di Catalonia mulai dari pra-referendum hingga pasca-deklarasi kemerdekaan Catalonia. Sejak awal, Uni Eropa sudah menegaskan posisinya untuk mendukung Spanyol mempertahankan dan menjaga kedaulatannya. Antonio Tajani, Presiden Parlemen Eropa menyatakan sikap bahwa Uni Eropa menolak mengakui deklarasi kemerdekaan Catalonia dari Spanyol. Ia menyatakan bahwa deklarasi tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum terhadap konstitusi nasional Spanyol, konstitusi Uni Eropa, dan Statuta Otonomi Catalonia. Tajani

mengharapkan agar dialog segera diadakan untuk menjamin kebebasan dan hak asasi manusia di Catalonia, namun tetap mengutamakan asas legalitas sebagai pondasinya (European Parliament President statement on the situation in Catalonia, 2017).

Berbanding lurus dengan pernyataan Tajani, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker juga menyatakan sikap Uni Eropa menolak mengakui deklarasi kemerdekaan Catalonia. Juncker menegaskan bahwa referendum yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2017 tidak sah dan menyalahi aturan. Senada dengan Tajani, Juncker juga sepakat bahwa supremasi hukum harus diutamakan dalam isu Catalonia. Ia juga berharap agar Uni Eropa bisa tetap solid dan kompak untuk mencapai persatuan dan stabilitas, bukan perpecahan dan disintegrasi. Juncker juga mendukung Pemerintah Spanyol dibawah pemerintahan Perdana Menteri Mariano Rajoy untuk mengelola isu Catalonia ini dengan baik (Statement on the events in Catalonia, 2017).

Thorbjorn Jagland, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Eropa juga menegaskan posisi Uni Eropa untuk mendukung Pemerintah Spanyol dan menolak deklarasi kemerdekaan sepihak dari Catalonia. Ia juga menyatakan sikapnya mendukung persatuan dan kesatuan Spanyol (Anadolu Agency, 29/10/2017). Berbagai pernyataan dan sikap yang ditunjukkan oleh pejabat dan petinggi Uni Eropa dapat menunjukkan bahwa sikap Uni Eropa yaitu solid mendukung Pemerintah Spanyol dan menolak deklarasi kemerdekaan Catalonia. Uni Eropa juga seolah lepas tangan dan tidak ingin ikut

campur terlalu dalam dengan isu Catalonia. Uni Eropa menyerahkan sepenuhnya permasalahan mengenai Catalonia ke Pemerintah Spanyol. Uni Eropa juga berharap agar Pemerintah Spanyol dapat mengatasi krisis politik tersebut sesegera mungkin.

4.2 Hasil Temuan dan Analisa

4.2.1 Variabel Internal

4.2.1.1 Letak Geografis Catalonia Dipandang Strategis di Eropa

Catalonia ialah wilayah yang terletak di timur laut Spanyol dan memiliki luas 32.108 km². Catalonia memiliki perbatasan darat dengan Andorra dan Prancis di sebelah utara, dengan Spanyol di sebelah barat, serta memiliki akses langsung ke Laut Mediterania di sebelah timur (Catalonia facts & figures, 2019). Catalonia terdiri atas 4 provinsi yaitu Barcelona, Lleida, Girona, dan Tarragona. Ibu Kota dari Catalonia yaitu Barcelona sekaligus mejadi kota terbesar kedua di Spanyol setelah Madrid dan menjadi salah satu kota termaju di Eropa (Barrcels, 1996).



Peta Catalonia

(Sumber: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catalonia-regions-map.svg>)

Peneliti melihat bahwa Catalonia terletak di posisi yang sangat strategis bahkan dapat dikatakan terletak di jantung Spanyol dan Eropa. Catalonia juga menjadi wilayah yang sangat penting dalam distribusi barang di Eropa dan Spanyol. Barang-barang yang akan dikirimkan baik dari atau ke Spanyol melalui darat, akan banyak melalui jalan-jalan di Catalonia. Jika Catalonia lepas dari Negara Spanyol maka otomatis distribusi barang tersebut juga akan terganggu dan mengancam perekonomian Spanyol dan Eropa. Disamping itu, dari segi perairan, jika Catalonia berhasil lepas dari Spanyol, maka juga akan mengganggu jalur perdagangan di laut. Hal tersebut dikarenakan Catalonia akan menguasai perairan di bagian timur dari wilayah mereka. Tentu menjadi kekhawatiran bagi negara-negara anggota Uni Eropa jika Catalonia berhasil melepaskan diri dari Spanyol. sehingga mereka kompak untuk mendukung kedaulatan Spanyol dan menolak deklarasi kemerdekaan Catalonia.

4.2.1.2 Interaksi Uni Eropa dan Anggotanya Berjalan Baik dengan Spanyol Namun Tidak dengan Catalonia

Spanyol memiliki hubungan yang panjang dengan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya. Pada 1 Januari 1986, Spanyol bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Selanjutnya, pada 1991, Spanyol menandatangani Traktat Schengen, yang mana dalam traktat tersebut mengatur penghapusan kontrol perbatasan antara negara-negara anggota MEE. Pada tahun 1993, MEE bertransformasi menjadi Uni Eropa (UE), tujuan persatuan Eropa yang semua berfokus hanya

dalam bidang ekonomi, perlahan berubah menjadi semakin kompleks dan menangani banyak isu, mulai dari hukum, budaya, pendidikan, sosial, ekonomi, dan sebagainya (Guzzetti, 1995).

Spanyol telah menjalin kerjasama dan memiliki sejarah yang panjang dengan Uni Eropa, Spanyol juga telah berperan aktif dalam berbagai kesepakatan dan perjanjian. Mulai dari *Treaty of Amsterdam* (1997), *Treaty of Nice* (2001), dan *Treaty of Lisbon* (2007), serta *Treaty establishing a constitution of Europe* (2004). Spanyol juga kerap dipercaya untuk menjabat beberapa posisi strategis di Eropa salah satunya posisi sebagai Presiden Dewan Uni Eropa. Spanyol pernah menduduki posisi tersebut pada tahun 1989, 1995, 2002, 2010, dan akan kembali menjabat pada tahun 2023. Selain itu, Spanyol juga memiliki perwakilannya di Parlemen Eropa dan berbagai lembaga Uni Eropa lainnya (Guzzetti, 1995).

Interaksi yang telah dibangun oleh Spanyol dengan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya sejak lama telah membuahkan suatu ikatan persahabatan atau aliansi yang sangat dekat dan kuat. Sedangkan, Catalonia tidak memiliki akses yang begitu berarti untuk melakukan interaksi dengan Uni Eropa. Ada Colau, yang merupakan Wali Kota dari Barcelona bahkan meminta Uni Eropa untuk mengatasi dan menengahi krisis dan ketegangan politik antara Barcelona dan Madrid. Ia meminta agar Uni Eropa mau menjadi mediator konflik tersebut. Namun, Uni Eropa enggan mengikuti permintaan tersebut bahkan secara jelas menolak menjadi mediator.

Presiden Dewan Eropa Donald Tusk menyatakan bahwa tidak ada ruang dan tempat untuk melakukan mediasi dan menyerahkan permasalahan Catalonia kepada internal Pemerintah Spanyol (CNN, 27/10/2017). Uni Eropa dan anggotanya tentu tidak ingin kehilangan salah satu aliansi terkuatnya yaitu Spanyol, hanya karena memihak Catalonia. Oleh karena itu, Uni Eropa dan negara anggotanya menolak deklarasi kemerdekaan Catalonia dan lebih memilih menjaga hubungan baik dengan Spanyol.

4.2.1.3 Paradoks Separatisme dan Pandangan dari Uni Eropa dan Anggotanya, Spanyol, serta Catalonia

Terdapat paradoks ketika memandang suatu isu separatisme, yaitu *sovereignty*, *self-determination*, dan *territorial integrity*. Spanyol memandang deklarasi kemerdekaan sepihak oleh Catalonia sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum karena bertentangan dengan prinsip *sovereignty*, yaitu kedaulatan negara dan *territorial integrity*, yaitu hak untuk mengamankan teritori. Sedangkan, Catalonia memandang deklarasi kemerdekaan tersebut merupakan bentuk dari *self-determination*, yaitu hak untuk menentukan kehendak sendiri. Uni Eropa memandang separatisme oleh Catalonia sebagai tindakan yang inkonstitusional karena bertentangan dengan konstitusi yang berlaku. Sedangkan, Catalonia meyakini bahwa upaya mereka untuk memisahkan diri dari Spanyol merupakan bentuk *self-determination* yang merupakan perwujudan dari demokrasi dan bersifat mutlak.

Uni Eropa menilai bahwa Catalonia telah melanggar konstitusi Spanyol dan konstitusi Uni Eropa. Konstitusi yang dilanggar yaitu Konstitusi Spanyol 1978 Pasal 2 yang inti dari isinya ialah Bangsa Spanyol merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, serta Spanyol adalah rumah bagi seluruh masyarakat Spanyol dan tidak dapat diklaim hanya milik pihak tertentu (Wagner, Marin, & Kroqi, 2019). Selanjutnya argumen yang menyebutkan bahwa Uni Eropa harus menghormati hukum nasional negara anggotanya tertuang dalam Perjanjian Uni Eropa artikel 4 ayat 2, yang inti dari isinya adalah Uni Eropa harus menghormati segala aspek mendasar atau fundamental dari negara-negara anggotanya. Uni Eropa dituntut untuk menghormati kedaulatan dan konstitusi Spanyol sebagai negara berdaulat serta tidak ikut campur terlalu dalam mengenai urusan dalam negeri Spanyol (Wagner, Marin, & Kroqi, 2019).

Kesamaan sistem dalam teori *regional security complex* jika dikaitkan dengan isu Catalonia ialah Uni Eropa dan Spanyol satu pendapat memandang isu deklarasi kemerdekaan Catalonia yaitu merupakan bentuk separatisme yang melanggar konstitusi baik konstitusi nasional Spanyol maupun konstitusi Uni Eropa. Mereka juga menolak pandangan Catalonia yang menyatakan bahwa deklarasi yang mereka lakukan merupakan bentuk dari demokrasi. Persamaan pandangan tersebut antara Spanyol dengan Uni Eropa beserta anggotanya menjadikan mereka sebagai aliansi yang kuat dan kompak menolak mengakui deklarasi kemerdekaan Catalonia dari Spanyol.

4.2.2 Variabel Eksternal

4.2.2.1 Dunia Internasional Menolak Deklarasi Kemerdekaan Catalonia dari Spanyol

Dunia internasional juga turut memberikan atensi terhadap isu Catalonia. Mayoritas dunia internasional menolak deklarasi kemerdekaan sepihak yang dilakukan oleh Catalonia. Terdapat beberapa aktor internasional yang menurut peneliti memiliki *power* yang kuat, sehingga mempengaruhi sikap politik Uni Eropa terhadap isu Catalonia.

Pertama, Inggris yaitu negara yang dahulu pernah menjadi bagian dari Uni Eropa. Inggris menolak deklarasi kemerdekaan Catalonia dari Spanyol dikarenakan referendum 1 Oktober 2017 dianggap ilegal sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Spanyol. Perdana Menteri Theresa May juga menegaskan dukungannya untuk Pemerintah Spanyol dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku (Kabar24, 18/10/2017). Kedua, Jerman yaitu salah satu negara anggota Uni Eropa yang memiliki *power* cukup kuat di organisasi tersebut. Jerman juga menolak deklarasi kemerdekaan Catalonia dan mengharapkan agar dialog segera dilaksanakan untuk mengurangi tingkat ketegangan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Pemerintah Jerman Steffen Seibert (Kabar24, 28/10/2017).

Selain Jerman negara anggota Uni Eropa lainnya yang menolak yaitu Prancis. Prancis merupakan negara yang cukup berpengaruh di kawasan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan dukungannya

terhadap Pemerintah Spanyol untuk menegakkan segala hukum yang berlaku dan menolak deklarasi kemerdekaan Catalonia (AntaraneWS, 28/10/2017). Keempat, Amerika Serikat yaitu negara adidaya yang jelas memiliki *power* cukup kuat dalam perpolitikan dunia internasional. Amerika Serikat tidak ingin mengakui dan mendukung deklarasi kemerdekaan Catalonia tersebut. Amerika Serikat melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Heather Nauert menyatakan dukungan Amerika Serikat terhadap Spanyol untuk menegakkan konstitusi dan menjaga persatuan nasional (Kumparan, 28/10/2017).

Terakhir, Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau sering dikenal dengan NATO memiliki sikap politik yang sama dengan negara-negara sebelumnya yaitu menolak deklarasi kemerdekaan Catalonia. NATO meyakini isu Catalonia merupakan permasalahan internal Spanyol, dan meyakini bahwa Spanyol dapat mengatasi masalah tersebut dengan baik, demikian pernyataan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg (Anadolu Agency, 29/10/2017).



Foto bersama Kepala Negara G7 di Italia tahun 2017

(Sumber: <https://www.aljazeera.com/economy/2017/5/26/seven-things-you-need-to-know-about-the-g7-summit>)

Negara-negara dan satu organisasi internasional yang telah disebutkan sebelumnya merupakan aktor-aktor yang dipandang peneliti sebagai aktor internasional yang memiliki *power* yang kuat untuk memainkan perannya dalam perpolitikan global. Peneliti meyakini adanya korelasi antara sikap-sikap aktor internasional tersebut dengan sikap Uni Eropa terhadap isu Catalonia. Uni Eropa tentu ingin memiliki sikap sejalan dengan suara masyarakat dan aktor internasional pada umumnya agar legitimasi Uni Eropa dapat dipertahankan dalam perpolitikan global. Sehingga, pada akhirnya Uni Eropa memutuskan untuk menolak mengakui deklarasi kemerdekaan Catalonia dari Spanyol.

4.2.2.2 Brexit, Separatisme, dan Krisis Pengungsi Menghantui Negara-Negara di Uni Eropa

Sikap politik Uni Eropa menolak mengakui deklarasi kemerdekaan Catalonia juga dipengaruhi oleh peristiwa dan isu yang saat itu sedang berkembang dan mendapatkan atensi yang cukup besar. Terdapat beberapa isu yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini. Pertama, Brexit yaitu upaya Inggris untuk mencabut keanggotannya dari Uni Eropa. Inggris telah mengadakan referendum pada tahun 2016 dan hasilnya menunjukkan 51,9% pemilih menginginkan agar Inggris keluar dari Uni Eropa (Kompas, 24/06/2016). Tentu, hal tersebut merupakan tantangan besar bagi Uni Eropa, karena mereka harus kehilangan salah satu negara besar di Eropa. Sebelum Inggris, terdapat 3 negara tidak berdaulat yang juga keluar dari Uni Eropa, yaitu Aljazair (1962), Greenland (1985), dan St Barthelemy (2012)

(Dinan, 2004). Keluarnya negara-negara tersebut tentu mempersempit teritori Uni Eropa. Oleh karena itu, Uni Eropa tidak ingin kehilangan wilayah dan kontrol atas teritorinya kembali saat ini. Jika Catalonia berhasil merdeka, otomatis bukan lagi menjadi wilayah Uni Eropa, sehingga mereka memutuskan untuk menyatakan sikap menolak deklarasi kemerdekaan Catalonia dari Spanyol.

Kedua, separatisme yang dihadapi oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Selain separatisme di Eropa, Uni Eropa dan anggotanya juga menghadapi banyak kasus separatisme di banyak wilayah di Eropa. Wilayah yang hendak melepaskan diri tersebut, yaitu Basque (Spanyol), Kepulauan Faroe (Denmark), Flanders (Belgia), Kaledonia Baru dan Corsica (Prancis), Silesia (Polandia-Jerman-Ceko), serta Lombardy dan Veneto (Italia) (Wagner, Marin, & Kroqi, 2019). Jika Uni Eropa mengakui deklarasi kemerdekaan Catalonia, artinya sama saja memberikan lampu hijau bagi wilayah-wilayah separatis di Eropa untuk merdeka dari negara induknya. Uni Eropa tentu tidak ingin hal tersebut terjadi karena hanya akan mempersempit teritorinya dan juga menyebabkan perpecahan di tubuh Uni Eropa itu sendiri. Presiden Komisi Eropa, Jean Claude Juncker menegaskan bahwa Uni Eropa tidak menginginkan adanya perpecahan dan pemisahan diri, melainkan la menghendaki adanya persatuan nasional dan persatuan Eropa yang kuat. Oleh karena itu, Uni Eropa bersama dengan negara-negara anggotanya menolak deklarasi kemerdekaan Catalonia (Statement on the events in Catalonia, 2017).

Ketiga, krisis pengungsi yang terjadi di Eropa pada tahun 2015-2016. Krisis pengungsi tersebut juga menjadi tantangan besar bagi Uni Eropa dan negara-negara anggotanya pada saat itu, Pada periode satu tahun itu saja mereka harus menerima 2,3 juta pengungsi yang datang dari Asia dan Afrika (The refugee crisis in 2017, 2017). Tantangan yang berat itu tentu tidak dapat diselesaikan saat itu juga, namun berdampak pula terhadap sikap politik Uni Eropa pada tahun-tahun selanjutnya. Peneliti melihat konsentrasi dan fokus Uni Eropa harus tercurahkan cukup besar dalam krisis pengungsi tersebut. Sehingga, isu Catalonia tidak mendapatkan atensi besar dari Uni Eropa dan menyerahkan isu tersebut ke internal Pemerintah Spanyol. Selain konsentrasi Uni Eropa yang terpecah, Uni Eropa akan menghadapi masalah baru jika pengungsi yang sebelumnya bermukim di Catalonia harus dikembalikan ke Uni Eropa. Peneliti melihat ketiga isu tersebut cukup mempengaruhi sikap Uni Eropa terhadap isu Catalonia. Isu-isu tersebut meyakinkan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya untuk menolak deklarasi kemerdekaan Catalonia dari Spanyol.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini berfokus untuk menjawab rumusan masalah yang mejadi pokok pertanyaan dalam penelitian ini. Setelah melakukan penelitian, peneliti dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi sikap Uni Eropa menolak deklarasi kemerdekaan Catalonia dari Spanyol. Faktor-faktor tersebut dibagi

berdasarkan variabel internal dan variabel eksternal berdasarkan teori *regional security complex*. Jawaban untuk variabel internal yaitu Uni Eropa mempertimbangkan letak Catalonia yang sangat strategis; Uni Eropa dan anggotanya memiliki sejarah panjang dengan Spanyol sedangkan tidak dengan Catalonia; serta Uni Eropa mempertimbangkan adanya kesamaan pandangan antara dirinya dengan Spanyol memandang isu Catalonia. Sedangkan, jawaban untuk variabel eksternal yaitu Uni Eropa turut mempertimbangkan sikap dunia internasional yang sebagian besar menolak deklarasi kemerdekaan Catalonia dan Uni Eropa juga menghadapi beberapa isu yang sedang berkembang saat itu yang memerlukan atensi cukup serius, seperti Brexit, separatisme di Eropa, dan krisis pengungsi.

Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas dapat menjawab pokok pertanyaan penelitian ini yaitu apa faktor yang melatarbelakangi Uni Eropa menolak deklarasi kemerdekaan Catalonia dari Spanyol. Teori *regional security complex* telah menjelaskan alasan sikap Uni Eropa tersebut dari sudut pandang bahwa isu keamanan di suatu kawasan juga ditanggapi oleh negara-negara di kawasan tersebut karena dikhawatirkan dapat mengancam keamanan nasionalnya. Sehingga mereka menyuarakan sikap politik negara mereka yang dihimpun menjadi sikap politik bersama Uni Eropa. Peneliti meyakini bahwa Uni Eropa dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, Uni Eropa ingin mencapai satu tujuan besar yaitu menciptakan keamanan kawasan di Eropa,

sehingga mereka dengan tegas menolak deklarasi kemerdekaan Catalonia dari Spanyol.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, S. (2010). Metode penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Balcells, A. (1996). Catalan nationalism: Past and present. Springer.
- Baylis, J. (2020). The globalization of world politics: An introduction to international relations. Oxford university press, USA.
- Buzan, B. (2003). Regional security complex theory in the post-Cold War world. In Theories of new regionalism (pp. 140-159). Palgrave Macmillan, London.
- Buzan, B., Buzan, B. G., W'aver, O., Waever, O., & Buzan, O. W. B. (2003). Regions and powers: the structure of international security (Vol. 91). Cambridge University Press.
- Buzan, B. (2008). People, states & fear: an agenda for international security studies in the post-cold war era. Ecpr Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications.
- Cuadras-Morató, X. (Ed.). (2016). Catalonia: A New Independent State in Europe?. Routledge, Taylor & Francis Group.
- Guzzetti, L. (1995). A brief history of European Union research policy (p. 172). Luxembourg: Office for Official Publications of the European communities.
- Keating, M. (1996). Nations against the state: The new politics of nationalism in Quebec, Catalonia and Scotland. Springer.
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian

- Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
- Jurnal:**
- Connolly, C. K. (2013). Independence in Europe: secession, sovereignty, and the European Union. *Duke J. Comp. & Int'l L.*, 24, 51.
- Cheever, D. S., & Haviland, H. F. (1954). *Organizing for Peace: International Organization in World Affairs*. Boston: Houghton Mifflin Co.
- Dinan, D. (2004). *Europe recast: a history of European Union (Vol. 373)*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Ramadhana, P. (2019). *Respon Uni Eropa Terhadap Pemisahan Diri Catalunya Dari Spanyol Tahun 2017*.
- Requejo, F. (2005). Federalism in plurinational societies: Rethinking the ties between Catalonia, Spain, and the European Union. In *Theories of federalism: A reader* (pp. 311-320). Palgrave Macmillan, New York.
- Sebayang, T. R. (2016). *Peran Uni Eropa Terhadap Pembangunan Stabilitas Keamanan di Kosovo Pasca Merdeka Sebagai Misi Memperluas Keanggotaan Uni Eropa di Kawasan Eropa Timur (Doctoral dissertation, FISIP UNPAS)*.
- Wagner, A., Marin, J., & Kroqi, D. (2019). The Catalan struggle for independence and the role of the European Union. *Regional Science Policy & Practice*, 11(5), 787-803.
- Situs Internet:**
- Anadolu Agency. Uni Eropa Tegas Tolak Kemerdekaan Catalonia. Diakses pada 18 Desember 2021, dari <https://www.aa.com.tr/id/dunia/uni-eropa-tegas-tolak-kemerdekaan-catalonia/950572>
- BBC. Uni Eropa Lepas Tangan Soal Krisis Catalunya. Diakses pada 1 Maret 2022, dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41690159>
- Bisnis News. Catalonia Desak UE Hentikan Dukung Spanyol. Diakses pada 7 Maret 2022, dari <https://bisnisnews.id/detail/berita/catalonia-desak-ue-hentikan-dukung-spanyol>
- CNN. Bantu PM Spanyol "Kudeta" Catalonia, Uni Eropa Dikecam. Diakses pada 7 Maret 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171108022708-134-254217/bantu-pm-spanyol-kudeta-catalonia-uni-eropa-dikecam>
- CNN. Catalonia Ingin Merdeka, Walkot Barcelona Minta Mediasi Eropa. Diakses pada 20 Maret 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170928161617-134-244651/catalonia-ingin-merdeka-walkot-barcelona-minta-mediasi-eropa>
- Deutsche Welle. Catalonia Referendum Violence Prompts European Reaction. Diakses pada 21 Maret 2022, dari <https://www.dw.com/en/catalonia-referendum-violence-prompts-european-reaction/a-4077275>
- European Commission. Statement on The Events in Catalonia. Diakses pada 12 Maret 2022, dari https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_17_3626
- European Parliament. European Parliament President Statement on The Situation in Catalonia. Diakses pada 12 Maret 2022, dari https://www.europarl.europa.eu/former_ep_presidents/president-tajani/en/newsroom/european-parliament-president-statement-on-the-situation-in-catalonia.html
- European Social Network. The Refugee Crisis in 2017. Diakses pada 13 Maret 2022, dari <https://www.esn-eu.org/news/refugee-crisis-2017>
- European Union. Spain. Diakses pada 31 Maret 2022, dari <https://european-union.europa.eu>

- union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/spain_en
- France24, More Than 150.000 join pro migrant protest in Barcelona. Diakses pada 2 Juni 2022, dari <https://www.france24.com/en/20170218-over-150000-join-pro-migrant-protest-barcelona>
- Gencat. Population on 1 January, Province. Diakses pada 4 Maret 2022, dari <https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=245&lang=en>
- Generalitat de Catalunya. Catalonia Connects Your Business to the Competitive Economy It Needs. Diakses pada 19 Maret 2022, dari <http://catalonia.com/catalonia-barcelona/catalonia-barcelona/Catalonia-facts-figures.jsp>
- Investopedia. European Community (EC). Diakses pada 20 Maret 2022, dari <https://www.investopedia.com/terms/e/european-community.asp>
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel Belgia merangkap Luksemburg & Uni Eropa. Uni Eropa. Diakses pada 21 Maret 2022, dari <https://kemlu.go.id/brussels/id/read/uni-eropa/1669/etc-menu>
- Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Spain and The European Union. Diakses pada 4 Maret 2022, dari <https://www.exteriores.gob.es/en/PoliticaExterior/Paginas/EspanaUE.aspx>
- The Local. Why Catalonia is a Strategic Region for Spain. Diakses pada 27 Maret 2022, dari <https://www.thelocal.es/20171010/why-catalonia-is-a-strategic-region-for-spain/>
- Tirto. Referendum Catalunya: Kisah Kemerdekaan yang Gagal di Barcelona. Diakses pada 14 Desember 2021, dari <https://tirto.id/referendum-catalunya-kisah-kemerdekaan-yang-gagal-di-barcelona-c8>
- VOA. Uni Eropa Tegaskan Tolak Separatisme di Negara-Negara Anggotanya. Diakses pada 2 Desember 2021, dari <https://www.voaindonesia.com/a/uni-eropa-tolak-separatisme-negara-negara-anggota-/4094931.html>